

ORANG-ORANG KATOLIK DI INDONESIA (jilid 3)
ERA KEMERDEKAAN 1945-2010: sebuah TANGGAPAN

Oleh: Hendrikus Maku, S.Fil., M.Th., Lic.

Pengantar

“*Orang-Orang Katolik di Indonesia Era Kemerdekaan 1945-2010*” merupakan jilid ketiga dan terakhir dari rangkaian buku berjilid tiga, karya Profesor (Emeritus) Dr. Karel Steenbrink. Tentu ada banyak apresiasi, komentar dan juga kritikan yang konstruktif dari para pembaca terhadap keseluruhan isi dari trilogi ini. Sebagai pegiat dialog lintas agama dan kepercayaan yang sedikit paham mengenai agama Islam, saya akan memberikan beberapa komentar atau catatan mengenai isu perjumpaan umat Katolik dengan “yang lain”, dengan segala dinamikanya.

Catatan Apresiasi

Apa yang khas dan istimewa dari buku ketiga tentang orang-orang Katolik di Indonesia era kemerdekaan? Anda dan saya tentu sudah mengetahui bahwa buku ini tidak ditulis dari lingkaran orang-orang yang menentukan ‘misi dan visi’ Gereja Katolik di Indonesia, tetapi oleh seorang pengamat luar yang menghabiskan sebagian besar masa karier aktifnya di Indonesia sebagai seorang dosen di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Penulis karenanya merasa berkewajiban untuk menjelaskan agak terperinci beberapa segi organisasi serta praktik Gereja Katolik sebagai sebuah organisasi internasional. Sebagai seorang Misiolog dan pakar agama Islam yang terlibat dalam forum lintas agama, Penulis memiliki cukup banyak pengetahuan, simpati dan empati dengan jemaat Katolik. Untuk mereka karya ini dipublikasikan. Selain itu, kelompok lain yang kiranya terbantu oleh publikasi ini adalah orang-orang yang tertarik dengan sejarah Katolik, namun memiliki serba sedikit pengetahuan tentang geografi, sejarah dan politik Indonesia, serta aneka ragam budayanya. Oleh karena itu, bab-bab yang menelisik tentang berbagai daerah memiliki banyak penjelasan tentang perbedaan-perbedaan geografis ini. Namun hal ini juga merupakan sebuah prinsip metodologis: sebuah komunitas selalu harus beradaptasi dengan posisi sosial-budayanya.

Beberapa keistimewaan lain yang menjadi kekhasan dari publikasi ini adalah: *Pertama*, metodologi. Peneliti menggunakan model pendekatan ‘dari bawah’¹. Artinya, dalam mengakses data dan informasi, Peneliti lebih fokus kepada orang-orang Katolik (baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok) ketimbang berkonsentrasi kepada Gereja Katolik sebagai institusi hierarkis. *Kedua*, objektivitas. Sebagai Peneliti Asing yang profesional, bebas dari aneka kepentingan

¹ Jan S. Arintonang, dalam Karel Steenbrink, *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808-1942*, jilid 2 (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), hlm. -.

apapun, Prof. Karel tidak sungkan untuk secara rinci mengungkapkan dinamika internal pertumbuhan orang-orang Katolik Indonesia dengan segala bentuk persaingan dan rivalitasnya dengan Protestan dan Islam.² Benar bahwa pada umumnya sumber-sumber asli yang digunakan Steenbrink ditulis oleh kaum klerus asing demi kepentingan institusi Gereja. Namun sumber-sumber itu dibacanya bersamaan dengan dokumen-dokumen sejarah politik dan kajian-kajian antropologi budaya, malah ia membaca dan menafsir semua sumber tersebut lewat prisma teologi/misiologi. Para pembaca kemudian bisa menangkap dan memahami bahwa mahakarya ini tidak hanya terbatas pada perspektif para misionaris asing tentang teks dan konteks Indonesia, tetapi lebih daripada itu, keseluruhan publikasi ini bisa diterima sebagai “sebuah jendela”, melalui mana para pembaca dapat membaca konsep umat Katolik Indonesia dan seluruh perjalanan Gereja Katolik di era kemerdekaan.³ *Ketiga*, ikhtiar studi. Bahwa dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang kebanyakan ditulis oleh orang Barat, dan yang diinterpretasi seturut kaidah ilmu sejarah yang dapat diverifikasi, Penulis kemudian bisa membantu pembaca untuk tidak khilaf dalam mengenal jati diri orang-orang Katolik di masa silam.⁴

Bangkitnya Kepercayaan Diri Islam dan Hilangnya Peran Politik Umat Katolik: Sebuah Tanggapan

Salah satu topik penting yang dibahas dalam bab pertama dari karya besar ini adalah “Bangkitnya Kepercayaan Diri Islam dan Hilangnya Peran Politik Umat Katolik 1985-1998. Ada beberapa isu kebangsaan yang memang telah dinarasikan di sana tetapi (menurut hemat saya) **belum tuntas**. *Pertama*, dualisme hukum: hukum agama bersyariah dan hukum negara yang merujuk kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hukum agama selalu bersifat terbatas terlebih ketika ia berjumpa dengan realitas kemajemukan. Dia bukan ibu yang bisa merangkul pluriformitas agama-agama yang menjadi corak khas bangsa Indonesia. *Kedua*, isu Pesantren dan Madrasah yang sedang mencari sebuah kepastian. Kedua lembaga tersebut terjebak dalam situasi dilematis. Antara patuh kepada Departemen Agama dan/atau Departemen Pendidikan. Ataukah kedua lembaga tersebut harus bisa menyembah kepada “dua tuan” sekaligus? *Ketiga*, tuntutan wajib - tidak wajibnya mata pelajaran agama diajarkan di sekolah-sekolah dengan segala perdebatannya. Beberapa hari terakhir, viral di media sosial sebuah berita mengenai Lembaga Legislatif (DPR) yang telah menyetujui RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, di mana di dalamnya terkandung hal ikhwal mengatur pendidikan agama di luar Islam. Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) cukup responsif terhadap kebijakan tersebut. PGI berkeberatan dengan RUU tersebut (red pasal 69 dan 70) oleh karena

² *Ibid.*

³ Karel Steenbrink, *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808-1942*, jilid 1 (Maumere: Penerbit Ledalero, 2005), hlm. v-ix.

⁴ *Ibid.*

terlalu mencampuri urusan internal dari agama-agama.⁵ Dan isu *keempat* yang disentil Penulis adalah Surat Gembala Paskah 1997 yang berisikan seruan kegembaan dalam menanggapi aneka kerusuhan yang menelan banyak korban, termasuk nyawa manusia.

Dengan tidak bermaksud membatasi Prof. Karel untuk mengupas tuntas keempat isu di atas, pada kesempatan yang sangat terbatas ini, saya mengajak Prof. Karel dan kita sekalian untuk sedikit berkonsentrasi pada isu keempat, yakni “Surat Gembala Paskah 1997” yang ditafsir sebagai tanggapan atau sikap pastoral gereja terhadap realitas kerusuhan yang terjadi sejak pertengahan 1996 sampai 1997, yang menurut hemat saya merupakan suatu pembahasan yang belum tuntas.

Sebelum poin mengenai surat gembala ini dibicarakan, Penulis terlebih dahulu membuat suatu narasi singkat mengenai krisis besar yang terjadi di penghujung masa Orde Baru (ORBA). Krisis tersebut bermula dari aksi protes masyarakat terhadap membiarkannya korupsi dan inefisiensi pemerintah ORBA. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak berselang lama setelah aksi dan aspirasi rakyat disampaikan, publik minoritas dicambuki oleh serangkaian serangan terhadap banyak sekolah, gereja dan bangunan Kristen lainnya. Kejadian awal itu terjadi pertengahan tahun 1996. Masih pada tahun yang sama, tepatnya pada hari Minggu 9 Juni 1996 sepuluh bangunan gereja Protestan di Surabaya, yang sebagian besarnya adalah gereja-gereja kecil jemaat Pantekosta, dirusak dan beberapa darinya dibakar sekitar 3.000-an massa. Tidak pernah terbukti siapa penghasut aksi yang tampaknya terencana ini. Ada desas-desus bahwa ini adalah balasan terhadap perusakan beberapa masjid dan sebuah pasar di ibukota Timor Timur pada pertengahan tahun 1995. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1996 terjadi serangkaian peristiwa aneh yang berujung pada pembakaran 21 gereja dan sekolah di Situbondo. Juga sebuah panti asuhan dibakar, dan beberapa gereja lainnya di kota sekitarnya turut dirusakkan. Pada Natal 1996 rangkaian pembakaran lain melanda beberapa bangunan gereja di Jawa Barat, khususnya di wilayah Garut. Beberapa tafsiran atas bentrokan-bentrokan terakhir ini menuduh intelijen tentara sebagai otak serangan: konon bentrokan-bentrokan ini didalangi pasukan khusus agar dapat menuduh bahwa pemimpin oposisi Muslim Abdurrahman Wahid berada di balik aksi-aksi kekerasan. Seperti di Situbondo, massa yang marah menyerang kantor polisi dan gedung pengadilan, tetapi juga merusakkan bangunan-bangunan gereja. Dengan menyalahkan sesama Muslim atas serangan-serangan ini maka para pemimpin mereka juga bisa menjadi tersangka, dan kekuasaan lebih besar dapat diberikan kepada polisi dan tentara untuk mengendalikan agama. Serangan-serangan terhadap bangunan-bangunan gereja ini diikuti kerusuhan serupa di Tasikmalaya (26 Desember 1996), Rengasdengklok (30 Januari 1997), Banjarmasin (23 Mei 1997).

Dari rentetan peristiwa di atas secara kasat mata kita dapat menyimpulkan bahwa persoalan yang terjadi itu adalah persoalan agama. Pertanyaannya adalah **mengapa para uskup menginterpretasi pelbagai peristiwa di atas sebagai akibat dari ketertindasan sosial dan ekonomi dan bukannya konflik antragama?** Dengan kata lain, mengapa para uskup seperti

⁵ Uraian yang lebih lengkap tentang perdebatan ini bisa dibaca Tagar News edisi 24/10/2018.

mau membungkus konflik antaragama dengan *screen* ketertindasan sosial dan ekonomi? Apakah ada maksud terselebung yang ada di balik surat gembala itu? Apakah saat itu gereja berada di bawah tekanan dari agama mayoritas sehingga diperlukan suatu **bargaining politik** antara gereja dan negara? Andaikata kecurigaan saya ini benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pada tahun 1997 (atau juga tahun-tahun sebelumnya) gereja sudah sedang berkonspirasi dengan negara untuk menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Praktek-praktek haram seperti itu sangat bertentangan dengan Kan 747-755 yang berbicara mengenai tugas mengajar yang harus diemban oleh para uskup.⁶

Mohon klarifikasi dari Prof Karel.

Terima kasih!

STFK Ledalero 27 Oktober 2018

⁶ Paus Yohanes Paulus II, *Codex Iuris Canonici* (Jakarta: KWI, 2005), hlm. 219-221.